

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan yang pada hakekatnya bertujuan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan menurut Prof.Drs. R.Bintarto merupakan proses modernisasi yang mengantar masyarakat, bangsa dan negara kedalam kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Salah satu aspek pembangunan Nasional adalah pembangunan Keluarga Berencana. Di Indonesia Gerakan Pembangunan Keluarga Berencana ini telah dikembangkan oleh Pemerintah sejak Th 1970 dan mempunyai tujuan ganda yaitu menekan angka kelahiran dan menanamkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Keluarga Berencana ini dilandasi oleh Garis Besar Haluan Negara Th 1988 yang isinya antara lain berbunyi :

...pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui Program KB mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan Keluarga Berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang...

Memperhatikan perkembangan pembangunan Gerakan KB pada PJPT I telah berhasil meletakkan kerangka landasan bagi upaya pelembagaan dan pembudayaan NKKBS terhadap peningkatan

kesejahteraan keluarga. Keberhasilan ini terlihat dari perubahan yang cukup bermakna pada berbagai ciri kependudukan. Diantaranya pada kondisi Jawa Barat pada saat ini yang telah mengalami penurunan angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,20 % pertahun pada periode 1990 - 1993, dan terjadinya penurunan angka jumlah bayi yang dilahirkan oleh setiap wanita usia subur (TFR) dari keadaan 5,90 pada th 1970 menjadi 3,17 pada th 1994. Namun angka-angka tersebut masih berada diatas angka pertumbuhan Nasional bahkan diatas Propinsi-propinsi lainnya.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, dimana masyarakat diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan bantuan dari pemerintah. Hal ini berarti masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Didalam pembangunan Keluarga Berencana pada PJPT pertama partisipasi masyarakat lebih diarahkan pada kesertaannya menjadi peserta KB, tetapi pada tahap selanjutnya masyarakat diharapkan mampu pula berpartisipasi secara mandiri menjadi peserta dan pengelola program pembangunan tersebut.

Tingkat pencapaian peserta KB di Jawa Barat hingga tahun 1994 menurut SDKI 1994 telah mencapai 51% dari Pasangan Usia subur sebanyak 7.400.300. Dengan penggunaan alat kontrasepsi yang tertinggi adalah Suntikan yaitu 40,02% dan Pil yaitu 31,93 % sedangkan peserta KB dengan alat kontrasepsi yang efektif masih sangat rendah yaitu 28,05 %. Hal tersebut dapat dipahami apabila memperhatikan kendala-kendala yang ada, diantaranya tingkat drop

out dari partisipasi masyarakat dalam Gerakan KB setiap tahun masih cukup tinggi. Selama bulan April 1994 sampai dengan bulan Desember 1994 menunjukkan bahwa angka drop out peserta KB di Propinsi Jawa Barat mencapai 14 % dari jumlah peserta KB aktif. Kondisi tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan Gerakan KB, disamping faktor kendala lainnya seperti faktor kesehatan, faktor psikologis, sosiologis maupun faktor geografis.

Menurut Rogers (1971) partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan yang bersifat inovatif akan sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran serta sikapnya terhadap kegiatan tersebut. Upaya untuk merubah kesadaran (pengetahuan) dan sikap dalam kaitannya dengan ide baru tersebut adalah melalui upaya komunikasi khususnya upaya difusi inovasi. Dari kondisi tingginya angka drop out dan penggunaan jenis kontrasepsi diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta KB belum diikuti dengan kesadaran yang tinggi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pendapat seorang tokoh yaitu David Krech, et al. (1962. 225) yang mengemukakan bahwa :

Attitude change is brought about through exposure to additional information, changes in the group affiliations of the individual, enforced modification of behavior toward the object, and through procedures which change personality. The direction and degree of attitude change induce by information is function of situational factor and of the source, medium, form and content of information

Uraian tersebut menjelaskan bahwa komunikasi dalam peranannya sebagai alat atau media penyampaian informasi untuk perubahan sikap sangat menentukan keberhasilannya. Hal ini

berarti bahwa dalam upaya membina masyarakat untuk merubah sikap dan meningkatkan partisipasinya ,komunikasi mempunyai peranan yang berarti. Dilihat dari definisi dan tujuan yang akan dicapai maka proses penyebar luasan informasi mengenai Gerakan KB ini dapat merupakan suatu proses difusi inovasi apabila informasi tersebut merupakan hal baru bagi individu dan merupakan proses komunikasi persuasif apabila informasi tersebut telah diketahui .

Upaya komunikasi dalam pengelolaan Gerakan KB di Indonesia menjadi bagian yang sangat penting dan telah dilaksanakan dan dikembangkan oleh jajaran BKKBN bersama masyarakat , disamping kegiatan pelayanan KB dan pencatatan serta pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan KB. Kegiatan komunikasi ini dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik. Sesuai dengan perkembangan Gerakan KB dewasa ini kegiatan komunikasi yang telah dilakukan diberbagai tingkatan oleh para pengelola Gerakan KB tidak hanya bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi peserta KB dan menjadi pengelola Gerakan KB diwilayahnya. Tetapi diharapkan juga pada upaya pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat.

Didalam proses perubahan sosial yang menuntut partisipasi masyarakat peranan agen perubahan sangatlah penting. Agen perubahan adalah individu atau institusi yang diharapkan mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk merubah sikap dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Agen perubahan

dapat berasal dari instansi yang memiliki inovasi atau dari masyarakat itu sendiri.

Dalam pengelolaan Gerakan KB ,petugas lapangan KB (PLKB) diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Sehingga tugas dan fungsi petugas lapangan KB (PLKB) mencakup kegiatan : 1). pendekatan terhadap tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal yang ada diwilayahnya, 2).menyusun perencanaan pengelolaan Gerakan KB diwilayahnya bersama masyarakat,3). memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik secara individual maupun kelompok untuk menjadi peserta KB maupun menjadi pengelola Gerakan KB , 4).membina masyarakat untuk menjadi pengelola Gerakan KB diwilayahnya, 5).melakukan koordinasi dengan instansi lain, 6).memberikan pelayanan KB dan, 7).melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan Gerakan KB diwilayahnya.

Memperhatikan tugas dan fungsi tersebut, tampaknya komunikasi menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan seorang petugas lapangan KB (PLKB) dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu petugas lapangan KB (PLKB) dapat pula dikatakan sebagai agen perubahan, penyuluh atau komunikator pembangunan.

Berdasarkan hasil penilaian pihak BKKBN yang dilaksanakan bersama Universitas Padjadjaran (UNPAD) diperoleh temuan bahwa pada umumnya para petugas lapangan KB sebagai penyuluh KB lebih sering melakukan komunikasi yang bersifat individual (interpersonal communication) daripada komunikasi kelompok atau massa. Karena melalui komunikasi individual akan lebih mudah untuk mendapatkan sasaran daripada komunikasi kelompok. Disamping

itu masyarakat menganggap dengan komunikasi individual mereka merasa lebih akrab sehingga permasalahan yang sifatnya pribadi dapat dipecahkan dan waktunya dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki sehingga tidak merasa terganggu. Tetapi berdasarkan hasil analisa penilaian Gerakan Pembangunan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh BKKBN terhadap pelaksanaan kegiatan komunikasi (KIE) diketahui bahwa ternyata pengetahuan masyarakat tentang Gerakan KB sudah cukup tinggi, tetapi tidak ditunjang oleh sikap dan perilakunya.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh para petugas maupun pengelola baik melalui komunikasi massa, komunikasi kelompok maupun komunikasi individual belum menunjukkan keberhasilan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh FXA.Ins Semendison, dkk (1991) terhadap penampilan petugas KB dalam penyuluhan menunjukkan penilaian yang bersifat negatif, dan hal tersebut dianggap sebagai penyebab ketidak berhasilan pelaksanaan KIE atau penyuluhan tentang Gerakan Pembangunan Keluarga Berencana. Pendapat tersebut diantaranya adalah :

- Dalam melakukan penyuluhan atau KIE para petugas KB tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas terutama mengenai efek samping daripada kontrasepsi sehingga sering menimbulkan keraguan pada sasaran. Disamping itu materi penyuluhan yang diberikanpun kurang bervariasi sehingga terkesan para petugas kurang mempunyai wawasan yang luas mengenai Program KB dan kurang memahami kondisi masyarakat
- Dalam melakukan KIE atau penyuluhan jarang menggunakan alat bantu, padahal masyarakat merasa lebih jelas apabila dalam penyuluhan menggunakan

media/alat peraga penyuluhan.

- Pendekatan yang dilakukan oleh para petugas masih bersifat koersif dan membohongi terutama pada masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga kesertaan mereka dalam Gerakan KB karena paksaan, tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Dan ada kecenderungan bahwa para petugas selalu menghindar dari keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka diasumsikan bahwa untuk mengembangkan kemampuan seorang petugas KB untuk menjadi seorang komunikator yang berhasil maka perlu memperhatikan faktor ketrampilan dan kepribadian komunikator . Hal ini ditunjang oleh pendapat Ross (1974; 57) yang menjelaskan bahwa didalam proses komunikasi faktor kepribadian ,kecerdasan , pengalaman dan sikap seorang komunikator sangat menentukan keberhasilannya, terutama sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengolah dan menyampaikan isi pesan kepada orang lain. Hal ini tertuang dalam definisi komunikasi yang dikemukakannya :

Communication as a transactional process involving a cognitive, selecting and sharing of symbols in such a way as to help another elicit from his own experience a meaning or response similar to that intended by the source.

Demikian pula Jalaludin (1992; 32) menyatakan bahwa faktor kepribadian sangat menentukan kemampuan seorang komunikator diantaranya adalah aspek kecerdasan, kemampuan persepsi, konsep diri, sikap atraktif, motivasi dan kemampuan interaksi sosial.

Agar para petugas KB berhasil menjadi seorang komunikator atau penyuluh Gerakan Pembangunan Keluarga Berencana yang kredibilitasnya dapat diandalkan maka perlu upaya pembinaan dan

pengembangan baik melalui proses pembelajaran yang bersifat formal maupun non formal. Hal ini ditunjang oleh pendapat **Maureen Guirdham (1990, 8)** yang menyatakan bahwa tingkah laku komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh faktor belajar yang diperoleh individu tersebut baik belajar tentang nilai-nilai, pengetahuan, sikap maupun ketrampilan, disamping faktor kondisi sosial dimana individu tersebut berada seperti faktor budaya, status sosial, lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan pekerjaan dan juga faktor media massa.

Upaya pembinaan atau pengembangan dapat diberikan melalui berbagai kegiatan Pendidikan Luar Sekolah diantaranya adalah pendidikan orang dewasa (adult Education) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kepribadiannya. Menurut **Sudjana (1991 ; 75)** salah satu bentuk Pendidikan Orang Dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah melakukan pekerjaan atau suatu kegiatan sukarela dimasyarakat yang dilakukan dilingkungan lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintah adalah bentuk Pendidikan Lanjutan (Continuing Education). Pendidikan Lanjutan ini dilakukan berdasarkan adanya tuntutan pekerjaan atau kegiatan yang mengharuskan setiap orang untuk mengembangkan diri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, dan juga karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya Pendidikan Lanjutan bagi para petugas Keluarga Berencana dilingkungan Lembaga BKKBN telah banyak diselenggarakan dalam bentuk training atau pelatihan yang bertujuan agar mereka

mampu mengelola Gerakan Pembangunan KB dilingkungan wilayah kerjanya. Upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas Keluarga Berencana dalam bidang komunikasi (KIE) ini merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan dasar bagi petugas Keluarga Berencana dengan menggunakan kurikulum yang bentuknya telah terstruktur. Dilihat dari tujuan belajar yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam berkomunikasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gerakan KB. Untuk mencapai tujuan belajar tersebut maka materi yang dibahas mencakup teori tentang komunikasi dan motivasi, tehnik menyusun isi pesan, tehnik analisa sasaran, dan tehnik mengembangkan media komunikasi. Sedangkan metode yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut adalah metode ceramah, studi kasus, penugasan dan simulasi atau role play. Didalam pelatihan tersebut digunakan pula berbagai media belajar, tetapi waktu dan kedalaman pembahasan setiap materi sangat terbatas.

Kurikulum dan proses pelatihan tersebut menurut pengamatan peneliti kurang memperhatikan aspek pengembangan kepribadian petugas khususnya kepribadian komunikator. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan peneliti dilapangan yang ditemukan bahwa para petugas KB setelah mengikuti pelatihan dasar pada umumnya belum mampu menjadi seorang komunikator atau motivator yang efektif. Hal tersebut tampak antara lain dari sikap atau penampilannya yang kurang percaya diri, dan kurang mampu menganalisa atau menginterpretasikan kondisi dan apa yang ditampilkan oleh

sasaran. Isi pesan yang terlalu dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan kondisi sasaran. Serta terlihat kurangnya perhatian para petugas untuk mau mendengarkan dan memahami keluhan-keluhan sasaran.

Program pelatihan dengan menggunakan pendekatan "Experiential learning" yang menitik beratkan pada pengembangan pribadi dapat merupakan salah satu model belajar yang diharapkan cukup memadai untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembangkan kemampuan petugas lapangan KB dalam berkomunikasi. Dengan pendekatan "Experiential learning" seseorang akan belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dijalani.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut diatas maka dirasakan perlu untuk meneliti sejauhmana pengaruh suatu pelatihan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Luar Sekolah khususnya program pelatihan dengan menggunakan pendekatan "Experiential learning" sebagai suatu model belajar yang dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas KB dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan sejauhmana hubungan kepribadian seorang petugas KB dengan kemampuan dirinya untuk berkomunikasi secara interpersonal dalam upaya menggerakkan dan membina masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gerakan KB.

Sasaran penelitian ini adalah para petugas lapangan KB yang bertugas di daerah Kotamadya Bandung.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah "Sejauhmana faktor pelatihan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran PLS dan faktor kepribadian dalam menentukan pembentukan kemampuan komunikasi interpersonal Petugas KB sehingga mampu membina masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gerakan KB ?

Secara lebih terperinci masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah pengaruh pelatihan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran PLS dengan pendekatan "Experiential learning" terhadap peningkatan kemampuan petugas lapangan KB dalam komunikasi interpersonal ?
2. Sejauh manakah hubungan antara kepribadian petugas lapangan KB dengan kemampuan komunikasi interpersonal ?

C. Maksud dan tujuan penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh model pelatihan komunikasi interpersonal dan mendapat gambaran yang lebih tepat serta pemahaman yang lebih luas tentang sejauhmana pengaruh pelatihan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran PLS terhadap peningkatan kemampuan petugas lapangan KB tentang kemampuan komunikasi interpersonal, dan bagaimana hubungan kemampuan komunikasi interpersonal tersebut dengan kepribadiannya.

Untuk maksud tersebut maka tujuan penelitian ini diarahkan

pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Menelaah pengaruh pelatihan dengan pendekatan "Experiential learning" terhadap peningkatan kemampuan petugas KB dalam komunikasi interpersonal.
2. Mempelajari hubungan kepribadian dengan kemampuan petugas KB dalam berkomunikasi secara interpersonal.
3. Mendapatkan model pelatihan komunikasi dalam rangka pembinaan prestasi petugas KB.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan metode-metode belajar dalam Pendidikan Luar Sekolah dan pengembangan teori-teori Psikologi Komunikasi khususnya mengenai peranan kepribadian terhadap kemampuan komunikasi.
2. Dari segi guna laksana, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pimpinan dilingkungan BKKBN untuk proses pengembangan dan pembinaan tenaga Program KB, khususnya dalam pengelolaan pelatihan KIE dan pembinaan terhadap petugas serta pengelola Program KB .

